UNIVERSITAS GADJAH MADA
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ATAS TIDAK TERPENUHINYA SYARAT BERKAS PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT DIHADAPANNYA
ELOK PUSPA ARUM, Prof. Dr. Tata Wijayanta S.H, M. Hum
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Achmad Yulianto dan Fajar Mukti,2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Adji, Habib, 2009, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung

Anshori, Abdul Ghofur, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta

Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Mertokusumo, Sudikno, 2009, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 1997, *Etika Profesi Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Mustofa, 2014,*Tuntunan Pembuatan Akta-akta PPAT*, Karya media, Yogyakarta

Nico, 2003, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta

Notodisoerjo, Soegondo.R, 1993, *Hukum Notariat Indonesia suatu Penjelasan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Pound, Roscoe, 1996, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bharata, Jakarta

Samudra, Teguh, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, PT Alumni, Bandung

Soemardjono, Maria SW, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar,* PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Subekti, R, 1975, *Hukum Perjanjian,* PT. Pradnya Pramita, Jakarta

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ATAS TIDAK TERPENUHINYA SYARAT BERKAS PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT DIHADAPANNYA
ELOK PUSPA ARUM, Prof. Dr. Tata Wijayanta S.H, M. Hum
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Wiranata, I Gede A.B, 2005*, Dasar-Dasar Etika dan Moralitas (pengantar kajian etika profesi hukum)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW*)

(*Staatsblad* (S) 1847 No.23)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht)* ((S).1915 No 732)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Reglement Indonesia Yang Dibaharui ((S).1947 No. 44)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok agraria. Lembaran Negara Republik Indonesua Tahun 1960 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun Nomor 52) tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1996 tentang Formasi Pejabat Pembuat Akta Tanah

3. Tesis

Miming Yuliati, *Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Yang Telah Dibuatnya (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 07/PDT.G/1997/PN.BJM) Tanggal 28 Maret 1997,* Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013.

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) ATAS TIDAK TERPENUHINYA SYARAT BERKAS PEMBUATAN AKTA JUAL BELI TANAH YANG DIBUAT DIHADAPANNYA
ELOK PUSPA ARUM, Prof. Dr. Tata Wijayanta S.H, M. Hum
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Hersa Krisna Muslim, *Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tananh (PPAT) Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah "pura-Pura" (schijn handeling): Studi Kasus Putusan Perkara Perdata Nomor 08/PDT.G/2009.PN.BTL,* Tesis Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2013

Merry Yusnita, *Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta-Akta Yang dibuatnya Jika Terjadi Sengketa Putusan Nomor: 07/PDT.G/1997/PN.PTK*, Tesis Magister Universitas Diponegoro, Semarang 2010

4. Wawancara

Sumendro,2015, Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Tidak Terpenuhinya Syarat Berkas Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Dihadapannya, Sleman, *wawancara*, 16 Juni

Muslimin Ikwanul Mochamad,2015, Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas tidak Terpenuhinya Syarat Berkas Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Dihadapannya, Sleman, *wawancara*, 3 Juli

Darussalam Nurhadi,2015, Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Tidak Terpenuhinya Syarat Berkas Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Dihadapannya, Sleman, *wawancara*, 25 Mei

Miyanto, 2015, Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Tidak Terpenuhinya Syarat Berkas Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yang Dibuat Dihadapannya, Sleman, *wawancara*, 22 April